



Suksesi Pendidikan Nasional (Analisis Intervensi Politik Pemerintah Provinsi)

Asril Umar^{1*}, Muhammad Sirozi², Solihah Titin Sumanti³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia^{1,3}

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia²

asriloemar@gmail.com^{1*}, m.sirozi@radenfatah.ac.id², solihahtitinsumanti@uinsu.ac.id³

Abstrak: Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional menjadi agenda utama bagi pemerintah Indonesia. Namun, implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika, termasuk intervensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis intervensi politik pemerintah provinsi dalam suksesi pendidikan nasional di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana intervensi politik tersebut mempengaruhi kualitas dan pemerataan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa provinsi di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan pendidikan, analisis dokumen kebijakan, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik memiliki dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pendidikan, baik dari segi penganggaran, distribusi sumber daya, maupun pelaksanaan program-program pendidikan. Namun, intervensi politik juga ditemukan sering kali menimbulkan konflik kepentingan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai suksesi pendidikan yang lebih baik, diperlukan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan komitmen yang kuat dan kebijakan yang tepat, intervensi tersebut dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam sistem pendidikan, sehingga mampu mencetak generasi yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Kata kunci: Intervensi Politik, Pendidikan, Suksesi.

National Education Succession (Analysis of Provincial Government Political Interventions)

Abstract: Efforts to improve the quality of national education have become a primary agenda for the Indonesian government. However, the implementation of educational policies in Indonesia is not without challenges and dynamics, including political intervention. This study aims to analyze the political intervention of provincial governments in the success of national education in Indonesia. The main focus of this research is to evaluate the extent to which such political interventions affect the quality and equity of education. This study employs a qualitative approach using case study methods in several provinces in Indonesia. Data were collected through in-depth interviews with education stakeholders, policy document analysis, and field observations. The results indicate that political intervention significantly impacts the implementation of educational policies in terms of budgeting, resource distribution, and program execution. However, political intervention is also found to often create conflicts of interest that can hinder the achievement of national education goals. This study concludes that to achieve better educational success, more transparent and accountable policies are needed, as well as strengthened coordination between the central and provincial governments. With strong commitment and appropriate policies, such interventions can bring significant positive changes to the education system, thereby producing a competitive generation ready to face future challenges.

Keywords: Education, Political Intervention, Succession.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. Keberhasilan suatu negara dalam mengembangkan sumber daya manusianya sangat bergantung pada sistem pendidikan yang ada (Widyanto, 2022). Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menghasilkan individu-individu yang cerdas dan kompeten, tetapi juga

berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional menjadi agenda utama bagi pemerintah Indonesia. Namun, implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika, termasuk intervensi politik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Intervensi politik ini bisa berdampak positif maupun negatif tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan. Dalam banyak kasus, pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pendidikan, karena mereka lebih dekat dengan konteks lokal dan lebih memahami kebutuhan spesifik di daerah mereka (Afridzal et al., 2018).

Pemerintah provinsi dapat mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Mereka dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efektif, memfasilitasi pelatihan bagi guru, serta meningkatkan infrastruktur pendidikan. Misalnya, beberapa provinsi di Indonesia telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan melalui program beasiswa, pengembangan kurikulum berbasis lokal, dan peningkatan kapasitas tenaga pengajar (Ilyas, 2014).

Namun, di sisi lain, intervensi politik juga dapat menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang terjadi penyalahgunaan wewenang, di mana kebijakan pendidikan dijadikan alat politik untuk meraih dukungan masyarakat atau mempertahankan kekuasaan. Hal ini bisa mengarah pada pengalokasian anggaran yang tidak efisien, program-program yang tidak berkelanjutan, serta ketimpangan dalam akses pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya. (PH, 2014)

Lebih lanjut, desentralisasi yang diberikan kepada pemerintah provinsi dalam mengelola pendidikan juga membawa tantangan tersendiri. Meskipun desentralisasi bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah, implementasinya sering kali menemui berbagai hambatan. Ketidakmerataan kemampuan manajerial dan sumber daya antarprovinsi menyebabkan beberapa daerah tertinggal dalam hal kualitas pendidikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun intervensi politik pemerintah provinsi memiliki potensi besar, tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, intervensi ini bisa menjadi kontraproduktif. Dalam konteks ini, penelitian mengenai suksesi pendidikan nasional melalui analisis intervensi politik pemerintah

provinsi menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana intervensi politik pemerintah provinsi berkontribusi pada peningkatan atau penurunan kualitas pendidikan nasional. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan model kebijakan yang efektif dan berkelanjutan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. (Khobiburrohma et al., 2020).

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan intervensi politik dalam bidang pendidikan. Faktor-faktor tersebut meliputi kebijakan anggaran, program-program pendidikan, kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan, serta partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang lebih baik. (Hady, 2013).

Demikian, pendidikan nasional yang sukses tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga pada peran aktif dan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Oleh karena itu, analisis terhadap intervensi politik pemerintah provinsi dalam pendidikan menjadi krusial untuk memahami bagaimana kebijakan lokal dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional yang lebih luas. Melalui penelitian ini, diharapkan akan terwujud sebuah sistem pendidikan yang tidak hanya merata dan adil, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, analisis dokumen kebijakan, serta observasi lapangan. (Sugiono, 2019). Analisis data dilakukan secara sistematis, dimulai dengan transkripsi verbatim wawancara, dilanjutkan dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama, serta analisis dokumen kebijakan untuk memahami konteks dan implementasi kebijakan. Observasi lapangan dianalisis dengan mencatat temuan secara rinci dan mengaitkannya dengan data wawancara dan dokumen. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi metode dengan membandingkan data dari wawancara, dokumen, dan observasi, serta member checking untuk mengonfirmasi temuan dengan partisipan. Peneliti juga menjaga catatan

lapangan dan jurnal refleksi yang mendetail, serta melakukan peer debriefing untuk memperoleh masukan konstruktif dari sesama peneliti. Strategi ini memastikan temuan yang tidak bias dan didukung oleh berbagai sumber data, serta memperkuat validitas dan kredibilitas hasil penelitian. (M. Abdullah, 2015).

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan pemerintah provinsi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Dalam era otonomi daerah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sangat menentukan kualitas pendidikan yang akan diterima oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah provinsi harus mampu mengembangkan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayahnya (Hastuti & Soehartono, 2018).

Salah satu strategi yang digunakan adalah sistem zonasi. Sistem zonasi ini membagi wilayah menjadi beberapa zona berdasarkan kualitas dan fasilitas pendidikan yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan akses ke sekolah yang paling sesuai dengan kebutuhan pendidikan mereka. Dengan demikian, siswa dapat dipindahkan ke sekolah yang lebih baik berdasarkan kualitas pendidikan yang diperlukan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara lebih efektif dan efisien (Yuliah, 2020).

Namun, penerapan kebijakan sistem zonasi tidaklah tanpa tantangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah potensi terjadinya ketimpangan akses pendidikan. Di negara maju, keadaan zonasi dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana siswa dari daerah tertentu mungkin memiliki akses yang lebih baik ke sekolah berkualitas dibandingkan siswa dari daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah provinsi harus mampu menyesuaikan kebijakan sistem zonasi dengan kondisi daerah masing-masing agar tidak terjadi ketimpangan akses pendidikan (Hariyadi, 2021).

Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah provinsi perlu mengembangkan kebijakan yang lebih fleksibel. Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah dengan menyesuaikan komposisi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi. Misalnya, kebijakan bisa menetapkan bahwa minimal 50 persen siswa diterima melalui jalur zonasi, sementara jalur afirmasi menerima minimal 15 persen siswa, dan jalur perpindahan menerima maksimal 5 persen siswa. Sisanya, sekitar 0-30 persen, dapat diterima melalui jalur prestasi atau

sesuai dengan kondisi daerah (Suryadi & H.A.R Tilaar, 2003).

Selain itu, pemerintah provinsi juga harus memastikan bahwa fasilitas pendidikan di setiap zona memadai dan berkualitas. Ini termasuk peningkatan kualitas guru, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penyediaan program-program pendidikan yang relevan dan inovatif. Dengan begitu, diharapkan semua siswa, terlepas dari zona tempat tinggalnya, mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pemerintah provinsi harus terus memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan zonasi ini, serta siap melakukan penyesuaian jika diperlukan. Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat, sangat penting dalam proses ini. Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan yang diterapkan akan lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan (Lamadang et al., 2022).

Di samping itu, upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya terbatas pada sistem zonasi. Pemerintah provinsi juga harus mengembangkan kebijakan lain yang mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Misalnya, pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi atau kurang mampu, penyediaan program pelatihan dan pengembangan untuk guru, serta pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi (Solichin, 2015).

Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil yang sering kali mengalami keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Berbagai kebijakan yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah dapat memberikan dampak signifikan terhadap akses pendidikan. Salah satu langkah paling fundamental yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah pembangunan infrastruktur pendidikan. Ini mencakup pembangunan sekolah, perpustakaan, laboratorium, serta fasilitas olahraga yang memadai. Di daerah-daerah terpencil, sering kali fasilitas pendidikan yang ada sangat minim dan tidak memenuhi standar yang layak. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur ini. Pembangunan fasilitas yang memadai tidak hanya meningkatkan akses fisik siswa ke sekolah, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan

mendukung proses pembelajaran yang efektif (Satria, 2020).

Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru dan tenaga pendidik. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada pemberdayaan guru sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan dan pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan. Guru-guru di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan rekan-rekan mereka di perkotaan untuk mengikuti pelatihan atau workshop. Dengan adanya kebijakan yang menyediakan akses kepada pelatihan berkualitas, guru-guru dapat meningkatkan kompetensi mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa (Hair, 2018).

Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah yang mengembangkan program pendidikan spesifik sesuai dengan kebutuhan lokal sangat penting. Misalnya, di daerah dengan komunitas adat yang kuat, program pendidikan bisa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat adat. Begitu juga di daerah pertanian, kurikulum bisa menekankan pada ilmu pertanian dan keterampilan yang relevan. Selain itu, program-program kebudayaan dan kesenian lokal dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya setempat (Suwarno, 2016).

Kebijakan yang efektif sering kali melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, universitas, dan sektor swasta. Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah dapat mengumpulkan informasi yang relevan, mendapatkan dukungan, dan menerima masukan dari para ahli. Selain itu, jejaring kerja sama ini juga memungkinkan adanya sinergi dalam upaya peningkatan akses pendidikan. Misalnya, universitas dapat terlibat dalam program pengabdian masyarakat di daerah terpencil, sementara sektor swasta bisa memberikan bantuan berupa dana atau fasilitas pendidikan (Wathoni, 2020).

Di era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran penting dalam pendidikan. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penggunaan TIK dalam pembelajaran dapat membuka akses siswa di daerah terpencil ke sumber daya pendidikan yang lebih luas. Misalnya, dengan memperkenalkan e-learning dan perpustakaan digital, siswa dapat mengakses materi pelajaran yang tidak tersedia secara lokal. Selain itu, teknologi juga dapat

digunakan untuk pelatihan guru secara online, sehingga mereka tidak perlu meninggalkan daerah terpencil untuk mendapatkan pelatihan berkualitas (Sanisah, 2015).

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Kebijakan pemerintah daerah yang memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan kepada masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pendidikan. Misalnya, pelatihan keterampilan hidup dan kewirausahaan bagi orang tua dapat membantu mereka mendukung pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah mereka (Fajar et al., 2022).

Intervensi politik pemerintah provinsi memiliki dampak signifikan pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks Indonesia, pemerintah provinsi memainkan peran penting dalam mengatur dan mengelola sistem pendidikan di wilayahnya. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola sistem pendidikan di wilayahnya, berperan sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi warga negara. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah provinsi harus berupaya meningkatkan akses layanan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem pendidikan (Samsinar et al., 2021).

Pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam meningkatkan anggaran pendidikan untuk membiayai biaya operasional sekolah, biaya pendidikan, serta biaya lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan anggaran pendidikan yang memadai, sekolah-sekolah di berbagai daerah dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Selain itu, alokasi anggaran yang tepat dapat digunakan untuk mendanai program-program beasiswa bagi siswa kurang mampu, sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi siswa dalam pendidikan (Alfian, 2019).

Selain itu, pemerintah provinsi juga dapat meningkatkan infrastruktur pendidikan dengan membangun gedung sekolah yang lebih baik, memperbaiki fasilitas pendidikan, serta meningkatkan kualitas peralatan pendidikan. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Bangunan sekolah yang layak dan

fasilitas yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang olahraga, dapat mendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya peralatan pendidikan yang canggih dan modern, siswa dapat mengakses sumber belajar yang lebih variatif dan relevan dengan perkembangan zaman (Hair, 2018).

Selanjutnya, pemerintah provinsi dapat meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan memberikan pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru. Kualitas guru sangat menentukan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru. Pemerintah provinsi dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyelenggarakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan guru, baik dari segi penguasaan materi pelajaran, metode pengajaran, maupun penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar, sebagaimana diungkapkan oleh E. W. B (2019).

Pemerintah provinsi juga dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas kurikulum, bahan ajar, dan metode pengajaran. Kurikulum yang berkualitas harus mampu menjawab kebutuhan siswa dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, bahan ajar yang digunakan harus up-to-date dan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Metode pengajaran juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi daerah, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien (Rismawati, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga harus ditingkatkan. Pemerintah provinsi dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan, serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan pendidikan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pendidikan, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan (Hamsinar, 2020).

Kerjasama antara pemerintah provinsi dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, juga sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah provinsi dapat

menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah, serta bekerja sama dengan dunia usaha untuk menyediakan program magang dan pelatihan bagi siswa. Selain itu, kerjasama dengan masyarakat dapat dilakukan melalui program-program pendidikan non-formal dan pemberdayaan masyarakat (Suryani, 2021).

Keterlibatan pemerintah provinsi dalam dunia pendidikan adalah langkah yang penting dan strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah provinsi memiliki peran signifikan dalam menyusun kebijakan, mengalokasikan sumber daya, serta mengimplementasikan program-program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Untuk memperkuat sektor pendidikan, pemerintah provinsi dapat mengambil beberapa langkah konkret.

Pertama, meningkatkan anggaran pendidikan adalah hal yang esensial. Pemerintah provinsi harus memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan. Anggaran ini dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, menyediakan fasilitas belajar yang memadai, serta meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan anggaran yang cukup, pemerintah provinsi dapat memastikan bahwa semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran (Aziz et al., 2023).

Selain itu, pengembangan infrastruktur pendidikan juga sangat penting. Infrastruktur pendidikan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pemerintah provinsi harus berinvestasi dalam pembangunan dan perbaikan gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas olahraga. Penyediaan akses internet dan teknologi informasi di sekolah-sekolah juga harus menjadi prioritas untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi (Nasution, 2021).

Peningkatan kualitas guru adalah langkah penting lainnya. Guru adalah faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah provinsi harus mengadakan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru secara berkala. Program ini harus mencakup peningkatan kompetensi pedagogik, penguasaan teknologi informasi, serta pembaharuan kurikulum sesuai dengan perkembangan terbaru. Insentif bagi guru yang berprestasi juga dapat diberikan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi (Syafriana, 2021).

Pemberdayaan masyarakat juga tidak kalah penting. Partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan sangat penting. Pemerintah provinsi harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan. Program-program pendidikan non-formal dan pemberdayaan masyarakat harus dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat secara luas (Hair, 2018).

Kerjasama dengan pihak swasta juga dapat memberikan dampak positif bagi pendidikan. Pihak swasta dapat berkontribusi melalui penyediaan beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, serta penyelenggaraan program pelatihan dan magang bagi siswa. Kolaborasi ini dapat membantu menciptakan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja (Solichin, 2015).

Selain itu, implementasi kebijakan zonasi dapat membantu menciptakan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Pemerintah provinsi harus memastikan bahwa kebijakan zonasi diterapkan dengan adil dan transparan. Evaluasi terus-menerus juga diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan (Sanisah, 2015).

Pengembangan kurikulum yang relevan juga merupakan langkah yang penting. Kurikulum harus selalu diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Pemerintah provinsi harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha, dan ahli pendidikan untuk menyusun kurikulum yang inovatif dan relevan. Kurikulum ini harus mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan (Fajar et al., 2022).

Dengan langkah-langkah konkret tersebut, pemerintah provinsi dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Peningkatan kualitas pendidikan di tingkat provinsi akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan kompetitif di kancah global.

Dengan demikian, intervensi politik pemerintah provinsi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah provinsi harus terus berupaya mengembangkan kebijakan yang efektif, meningkatkan anggaran pendidikan, serta melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan

berbagai pihak terkait, diharapkan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan lebih baik dan merata di seluruh wilayah Indonesia (Lamadang et al., 2022).

4. Simpulan dan Saran

Intervensi politik pemerintah provinsi memiliki dampak signifikan terhadap suksesi pendidikan nasional. Kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah provinsi sering kali berperan sebagai katalis dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari alokasi anggaran pendidikan, penyediaan fasilitas yang memadai, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, hingga implementasi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global. Selain itu, intervensi politik yang tepat sasaran dapat membantu mengatasi kesenjangan pendidikan antar daerah. Dengan kebijakan yang mendukung pemerataan pendidikan, daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal dapat lebih mudah mengejar ketertinggalan mereka. Pemerintah provinsi, melalui kebijakan-kebijakan strategis, mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Namun, intervensi politik juga membawa tantangan tersendiri. Terkadang, kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan atau terhambat oleh birokrasi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa intervensi politik yang dilakukan benar-benar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Untuk meningkatkan efektivitas intervensi ini, pemerintah provinsi perlu memastikan alokasi anggaran pendidikan yang cukup, meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendidikan, serta mengadakan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama dengan sektor swasta juga sangat penting. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah provinsi dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, sehingga mampu mencetak generasi yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2013). Pendidikan Islam Sepanjang Sejarah: Sebuah Kajian Politik Pendidikan di Indonesia. *SUSURGALUR*, 1(2). <https://doi.org/10.2121/SUSURGALUR.V1I2.68>

- Abdullah, M. (2015). *Metode penelitian kuantitatif*. Aswaja pressindo.
- Afridzal, A., Abdullah, S., Saputra, M., & Hasnawati, H. (2018). Anggaran Pendidikan, Kepatuhan terhadap Regulasi, dan Intervensi: Sebuah Telaah Literatur. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 2(1), 32–39. <https://doi.org/10.33059/JENSI.V2I1.932>
- Alfian, M. A. (2019). Politik Zonasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2). <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6363>
- B, E. W. (2019). Politik Dan Sejarah Sosial Dalam Pendidikan Islam. *TAMADDUN*, 19(1). <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v0i0.814>
- B, M., & Hasyim, A. W. (2022). Pendidikan Multikultural Dalam Konsepsi Filsafat Pendidikan Islam. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman*, 6(02), 140–151. <https://doi.org/10.36671/MUMTAZ.V6I02.399>
- Fajar, A., Setiawan, F., & Fadila, M. (2022). Kebijakan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 10(3), 170–174. <https://doi.org/10.37081/ED.V10I3.3945>
- Hady, M. S. (2013). *Pengaruh Keterampilan Mengajar Guru, Minat Belajar Siswa Dan Kreativitas Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X Di Sma Negeri 2 Binjai T.A 2012/2013*.
- Hair, Moh. A. (2018). Kebijakan Politik Pendidikan Dalam Pembangunan Moralsosial. *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 5(2). <https://doi.org/10.31102/alulum.5.2.2018.13-22>
- Hariyadi, A. R. (2021). Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 259–276. <https://doi.org/10.30656/JDKP.V2I2.3887>
- Hastuti, T. P., & Soehartono, S. (2018). Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. *Jurnal Jurisprudence*, 8(1). <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>
- Ilham, D. (2019). Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109–122. <https://doi.org/10.58230/27454312.73>
- Ilyas, M. (2014). Problems Dayah Management Education In Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 4(2), 747–759. <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/136>
- Khobiburrohma, E. N., Margareta, P. S., & Hasbullah, MS. H. (2020). Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 139–148. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.900>
- Lamadang, K. P., Karlina, D. A., Nuraini, R. Z., & Febriani, W. D. (2022). Isu dan Kebijakan Global Politisasi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 63–76. <https://doi.org/10.55927/JIPH.V1I2.898>
- Mudlofir, A. (2016). Pendidikan Karakter: Konsep dan Aktualisasinya dalam Sistem Pendidikan Islam. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 229–246. <https://doi.org/10.21580/NW.2013.7.2.560>
- Nurhuda. (2020). *Landasan Pendidikan*. www.aahlmediapress.com
- PH, S. (2014). Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 33(3). <https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.2377>
- Samsinar, S., Sukarno, S., & El Widdah, M. (2021). Peran Politik, Kebijakan Terhadap Proses Pelaksanaan Dan Penilaian Pendidikan Islam. *Jurnal Literasiologi*, 6(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v6i2.259>
- Sanisah, S. (2015). Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan Di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 3(1), 101–118. <https://doi.org/10.21009/JPEB.003.1.5>
- Satria, H. S. (2020). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I2.660>
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2).
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Suryadi, A., & H.A.R Tilaar. (2003). *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. PT.Remaja Rosdakarya.
- Suryana, S. (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Edukasi*, 14(1).

- <https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971>
- Suwarno, S. (2016). Pendekatan Kebijakan Publik dalam Politik Pendidikan Islam. *Jurnal As-Salam*, 1(1).
- Wathoni, K. (2020). Pesantren Dalam Politik Dan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02). <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i02.2628>
- Widyanto, I. (2022). Politik pendidikan: Respons kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan menengah di Kota Surabaya. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 8(2). <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i2.39940>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2). <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>